



## PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH CAMAT DALAM UPAYA MENCAPAI EFEKTIVITAS PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI WILAYAH KECAMATAN MAJAKABUPATEN MAJALENGKA

Oleh :  
**YETI KUSWATI, Dra, M.Si**

### ABSTRAK

Hasil pengamatan penyusun pada kantor Camat Maja ternyata ditemukan masalah yang mengarah pada belum tercapainya efektivitas penyaluran raskin. Indikator masalah tersebut sebagai berikut : masih adanya penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran; efisiensi penggunaan anggaran tidak sesuai aturan; pemanfaatan warung desa belum optimal; pemanfaatan koperasi desa belum optimal; masih rendahnya gaji/upah petugas penyalur raskin.

Keadaan tersebut mencerminkan bahwa belum tercapainya efektivitas dalam penyaluran raskin yang disebabkan oleh Camat Maja selaku koordinator dalam pelaksanaan koordinasi belum menerapkan teknik-teknik koordinasi secara optimal. Hal ini diduga : Camat belum menerapkan koordinasi melalui konsensus; Camat belum menerapkan koordinasi melalui forum; Camat belum menerapkan koordinasi melalui konperensi.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pelaksanaan koordinasi oleh Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka”.

Landasan teori mengenai koordinasi dari Soewarno Handyaningrat, dan parameternya menggunakan teknik-teknik koordinasi, sedangkan efektivitas penyaluran raskin dari Gibson, parameter yang digunakan yaitu kriteria efektivitas.

Adapun hipotesis yang penyusun ajukan : “Jika koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pada teknik-teknik koordinasi, maka efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tercapai”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan observasi, wawancara dan angket. Populasi sebanyak 140 orang petugas, dari populasi tersebut 104 dijadikan sampel dengan perhitungan rumus slovin, menggunakan teknik purposive sampling.

Dari hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi Camat sebesar 61,7%, Predikat “cukup baik”, sedangkan efektivitas penyaluran raskin sebesar 60,1%, predikat “cukup baik”.

Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan, bahwa koordinasi yang di dasarkan pada teknik-teknik koordinasi mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) hal ini terlihat dari hasil penelitian penerapan teknik koordinasi baru mencapai predikat “cukup baik” menyebabkan efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja baru mencapai predikat cukup baik juga. Dengan demikian maka hipotesis yang penyusun ajukan dapat teruji kebenarannya dan dapat diterima.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang kemiskinannya masih merajalela. padahal Indonesia

sebagainegara yang kekayaan alamnya sangat melimpah. perekonomian Indonesia menurun sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 hal ini membuat



kondisi perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil lagi sehingga kemiskinan di Indonesia meningkat.

Kemiskinan masih terdapat pada penduduk Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan masih sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah social yang amat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam memecahkan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebab kemiskinan.

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 ([www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id)).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menemukan 28,55 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin. jumlah penduduk miskin pada September 2013 bertambah 0,48 juta orang dibandingkan posisi Maret sebanyak 28,07 juta. Kemiskinan itu merata di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Berita Resm Statistik BPS Provinsi Jawa Barat No. 2 04/01/32/Th. XVI, 2 Januari 2014. jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat padabulan September 2013 sebesar 4.382.65 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulanMaret 2013 sebesar 4.297.04 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen).

Berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 kantor badan pusat statistik kabupaten Majalengka tahun 2011 tercatat jumlah rumah tangga miskin yang ditetapkan berdasarkan basis data terpadu sebanyak 99.579 rumah tangga miskin.

Kecamatan Maja merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka yang terbilang cukup maju. Pusat pemerintahan berada di Desa Maja Selatan. Walaupun terbilang cukup maju tetapi Kecamatan Maja juga mempunyai permasalahan seperti Kecamatan lainnya. Selain pendidikan, pengangguran dan kesehatan, masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang harus diatasi bersama oleh Pemerintah Kecamatan dan seluruh stakeholder atau pelaku pembangunan di Kecamatan Maja. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Program Penyaluran Beras Miskin yang selanjutnya disingkat Raskin adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama(SKB) Menteri Dalam Negeri 1  
dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok yang merupakan salah satu hak dasar masyarakat. Program Raskin tersebut melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal, semua sektor terkait memiliki



tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan program raskin ini. Sementara secara vertikal, Program Raskin bukan program pemerintah pusat semata, akan tetapi juga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama, dimana daerah berperan pada penyaluran raskin.

Dalam penyampaian kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), pemerintah harus dengan 6 (enam) tepat (*tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi*). Pelaksanaan Program Raskin sangat tergantung kepada peran pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan dan biaya operasional dan lain sebagainya. Efektifitas program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar dinas/instansi dan lembaga terkait, baik di kabupaten maupun di kecamatan dan Desa/kelurahan.

Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu, maka tujuan dari sebuah organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau menejer dalam sebuah organisasi, artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan.

Begitu pula halnya dengan Camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas dalam

pelaksanaan penyaluran program Raskin adalah dengan dilaksanakannya koordinasi. Tercapainya efektifitas dalam penyaluran raskin di wilayah kecamatan Maja sangat tergantung pada koordinasi yang dilakukan oleh Camat Maja selaku koordinator di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja secara umum dilakukan melalui kelompok kerja (POKJA). Beras yang dibawa oleh satker raskin bulog kemudian diperiksa oleh pelaksana penyalur raskin kecamatan di titik distribusi, selanjutnya pelaksana distribusi (POKJA) menyerahkan beras kepada RTS-PM yang mempunyai kartu raskin dan terdaftar dalam (DPM-1) di titik bagi. Dalam pelaksanaan penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja masih banyak warga yang tidak termasuk kedalam RTS-PM yang menerima jatah beras miskin.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat peninjauan (Pra-penelitian) di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran raskin belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berikut :

1. Adanya penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran, atau diterima oleh orang yang tidak masuk kategori Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat
2. Efisiensi Penggunaan anggaran dalam penyaluran raskin tidak sesuai aturan..
3. Adanya warung desa yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyaluran raskin.
4. Adanya Koperasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyaluran raskin.

5. Gaji/upah petugas penyalur raskin masih rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Gejala-gejala tersebut menurut pengamatan penulis, diduga karena Camat Gejala-gejala tersebut menurut pengamatan penulis, diduga karena Camat selaku koordinator dalam pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya berusaha untuk :

1. Melaksanakan teknik koordinasi melalui Konsensus, dengan cara saling memberikan ide dan masukan serta mengutamakan kepentingan bersama.
2. Melaksanakan teknik koordinasi melalui forum dengan cara, membentuk tim kerja.

Melaksanakan teknik koordinasi konperensi dengan cara, melaksanakan rapat-rapat dalam pengambilan keputusan serta menyamakan persepsi.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi oleh Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka ?
2. Habatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka ?
3. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Camat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebaga berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi oleh Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran

raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Camat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Pengertian Koordinasi**

Koordinasi berarti penyatuan gerak seluruh bagian/unit dalam organisasi yang memiliki fungsi berbeda agar mengarah terhadap sasaran yang sama dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. koordinasi yang bertujuan agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Organisasi sebagai sistem/cara kerja sama sejumlah manusia untuk mencapai satu tujuan, tidak akan berlangsung efektif dan efisien tanpa koordinasi. Kerjasama memerlukan koordinasi, sebaliknya 10 didalam koordinasi terdapat kerjasama Kedua kegiatan tersebut memiliki ketergantungan, karena yang satu tidak akan ada tanpa yang lain.

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan perkataan lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan,

Untuk lebih mudah memberikan pengertian koordinasi berikut ini penyusun mengutip beberapa pendapat sarjana antara lain sebagai berikut :



Pariata Westa yang dikutip oleh Hadari Nawawi dan M Martini Hadari dalam bukunya “Ilmu Administrasi” berpendapat bahwa :

“Koordinasi adalah kegiatan untuk mengarahkan unit-unit kerja, pekerjaan-pekerjaan dan para personel organisasi agar semuanya berlangsung dalam suasana yang tertib, tidak kacau atau bentrok, tetapi tertuju pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” (1994:91)

Stoner yang dikutip oleh Dann Sugandha dalam bukunya “Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi” mengemukakan bahwa Koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (1988: 2)

Pendapat tersebut di pertegas oleh T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien” (2009: 195)

Leonard D. White yang dikutip oleh Sutarto dalam bukunya “Dasar-Dasar Organisasi” berpendapat bahwa :

koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain, dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan (2006:141)

Awaluddin Djamin yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah” berpendapat bahwa: koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, intasi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. (2008 : 86)

Selanjutnya menurut pendapat Ulber Silalahi dalam bukunya “Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen” yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. (2002 : 242)

Menurut Agus Subardi dalam bukunya “Pengantar Manajemen” mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses menyatukan dan menyingkronkan kegiatan-kegiatan yang berbeda sehingga mereka bekerjasama didalam pencapaian tujuan organisasi. (1997 : 200)

Dari definisi tersebut diatas maka koordinasi dapat disimpulkan sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam rangka menyatukan gerak, tujuan, dan kegiatan-kegiatan seluruh individu dan unit-unit atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar dapat benar-benar mengarah pada satu tujuan dan sasaran yang sama agar memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

### **2.3 Teknik-Teknik koordinasi**

Agar pelaksanaan koordinasi mendapatkan hasil yang optimal, dalam arti seluruh kegiatan individu dan unit-unit atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi dapat mengarah pada satu tujuan serta sasaran yang sama maka seorang

pimpinan organisasi dalam melaksanakan koordinasi harus berdasarkan pada teknik-teknik koordinasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soewarno Hanadayanngrat dalam bukunya "Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional", yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui konsensus
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
4. Koordinasi melalui suatu forum
5. Koordinasi melalui konperensi (1991:124)

Untuk lebih jelasnya mengenai teknik-teknik koordinasi tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi melalui kewenangan  
Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan dapat melakukan pendelegasian wewenang sehingga setiap bawahan bisa bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pimpinan, selain itu juga pimpinan bisa melakukan penyesuaian tugas dan fungsi dari setiap bawahan sesuai dengan kemampuan bawahannya.
2. Koordinasi melalui konsensus  
Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan mampu mengajak seluruh bawahannya agar dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dapat mengutamakan kepentingan bersama, saling membantu serta harus memiliki rasa saling membutuhkan demi tercapainya tujuan organisasi, selain itu pimpinan harus mampu mengajak bawahannya agar saling bertukar pikiran, saling

memberikan ide dan masukan demi kelangsungan organisasi

3. Koordinasi melalui pedoman kerja.  
Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan harus membuat pedoman kerja agar terdapat adanya kesatuan tindak dan kesatuan gerak dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan selain itu pedoman kerja merupakan sarana pengikat dan pengarah bagi kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan hal ini juga dapat membuat setiap bawahannya berkerja secara teratur sesuai dengan tugas dan wewenang yang di berikan oleh pimpinan
4. Koordinasi melalui suatu forum  
Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan dapat membentuk tim kerja untuk dijadikan wadah dalam mengadakan kegiatan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama. Selain itu juga pimpinan hendaknya mampu membagi tugas diluar institusi, dalam rangka menyelesaikan masalah atau tugas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit/organisasi yang bersangkutan.
5. Koordinasi melalui konperensi  
Dalam melaksanakan koordinasi hendaknya seorang pimpinan dapat melaksanakan rapat-rapat dalam rangka pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Selain itu juga pimpinan



dapat mengadakan rapat dalam menyamakan persepsi agar dapat mencegah timbulnya berbagai macam persepsi, sikap dan perilaku yang berbeda-beda dari para bawahan dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan..

Dari uraian-uraian tentang teknik-teknik koordinasi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penguasaan tentang teknik-teknik koordinasi oleh seorang pimpinan organisasi merupakan modal utama dalam melaksanakan koordinasi yang baik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan seluruh bagian-bagian atau unit-unit dalam organisasi dapat berjalan searah, dan terdapat kesatuan gerak dalam rangka tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan rencana, perintah dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

### **Pengertian Efektifitas**

Menurut Makmur dalam bukunya “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” mengemukakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. (2011 : 6)

Sedangkan Ibrahim Lubis dalam bukunya “Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen” berpendapat bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat seperti yang di kehendaki. (1985 : 221)

Menurut Richard M. Sters dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang diterjemahkan oleh Magdalena Jamin menjelaskan bahwa efektivitas dapat dipandang sebagai fungsi dari kemampuan sebuah organisasi secara sukses memadukan teknologi, struktur dan karakteristik pribadi dengan faktor-faktor

sosial menjadi kesatuan yang selaras dan berorientasi ke tujuan (1985:100)

Menurut Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (2013:86).

H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” berpendapat bahwa Efektifitas adalah : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (1994 : 16)

Adapun pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya “Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi” menyatakan bahwa : eektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan (1983:151)

Selanjutnya Ulber silalahi dalam bukunya “Asas-Asas Manajemen” menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (2011:416)

Dengan demikian penyusun menarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka penyusun berasumsi bahwa koordinasi pada prinsipnya dilaksanakan untuk menciptakan kesatuan gerak para

pegawai agar mengarah pada satu tujuan demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif.

### Kriteria Efektivitas

Pimpinan organisasi harus memiliki kriteria yang dapat menilai kemungkinan organisasi bertahan hidup. Dalam praktiknya pimpinan menggunakan sejumlah kriteria jangka pendek untuk kelangsungan hidup jangka panjang seperti produktivitas, efisiensi, kecelakaan, keluar masuk karyawan, tingkat absensi, mutu, tingkat pendapatan, moral dan kepuasan karyawan.

Masing-masing kriteria ini dapat relevan bagi tujuan tertentu. menurut Gibson dalam bukunya "Organisasi" menggunakan lima kriteria efektivitas diataranya adalah :

1. Produksi
  2. Mutu
  3. Efisiensi
  4. Fleksibilitas
  5. Kepuasan (1996:50)
1. Produksi berarti bahwa kemampuan organisasi dalam menghasilkan suatu barang atau jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan
  2. Mutu berarti bahwa kemampuan organisasi dalam memenuhi harapan pelanggan untuk kinerja produk dan jasa.
  3. Efisiensi berarti bahwa kemampuan organisasi dalam mengukur rasio keluaran dibanding masukan, agar pengeluaran tidak lebih besar dari pada pemasukan.
  4. Fleksibilitas berarti bahwa kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang

lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda.

5. Kepuasan berarti bahwa kemampuan organisasi dalam memuaskan kebutuhan karyawan.

### Program Beras Miskin (RASKIN)

Menurut wikipedia bahasa Indonesia raskin adalah (akronim dari *beras miskin*) Merupakan sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. <http://id.wikipedia.org/wiki/Raskin>

Program ini mulai pada Januari 2003. Untuk tahun 2010, jatah beras yang dialokasikan dikurangi menjadi 13 kg per rumah tangga per bulan sedangkan pada 2009 jatah ditetapkan 15 kg sampai sekarang.

Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2014 program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpendapatan rendah. (2014:2)

Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang meliputi: perencanaan dan penyediaan anggaran subsidi, penentuan rumah tangga sasaran (RTS) dan Pagu raskin, penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian program serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Perum BULOG berperan dalam pengadaan dan penyaluran raskin sampai titik distribusi (TD) di seluruh Indonesia,

dengan kuantitas serta kualitas yang sesuai ketentuan. Jadi, pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program dan pengadaan beras sampai di titik distribusi (TD)

### **Prosedur Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN)**

Program raskin harus direncanakan secara baik dengan melibatkan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya dengan memperhatikan kondisi obyektif masing-masing daerah.

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasional program raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka pendistribusian program raskin harus dilaksanakan sesuai prosedurnya, berikut adalah prosedur penyaluran raskin berdasarkan pada petunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Majalengka” :

1. Pendistribusian raskin melalui titik distribusi
  - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) raskin kepada Kepala Sub Drive Perum Bulog yang berdasarkan pagu alokasi dari RTS penerima manfaat raskin di masing-masing kecamatan.
  - b. Berdasarkan SPA tersebut, Kepala Sub Drive Perum Bulog menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/delivery order (SPPB/DO) kepada satker Raskin Sub Drive.
  - c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin Sub Drive mengambil beras digudang penyimpanan

Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi.

- d. Tim koordinasi kecamatan dan pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas raskin yang diserahkan satker di titik distribusi.
- e. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mempunyai kartu tanda tertentu sebagai tanda yang berhak menerima raskin dan terdaftar dalam daftar rumah tangga penerima manfaat.
- f. Lurah/kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pendistribusian beras, pembayaran hasil penjualan (HP) dan pengendalian beras raskin dari titik distribusi sampai kepada RTS.
- g. Penyerahan beras di titik distribusi dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh satker Raskin Sub Drive dan pelaksana distribusi yang menerima beras serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.
- h. Berdasarkan BAST Sub Drive membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing (MBA- 0) Kecamatan yang ditandatangani satker Raskin Sub Drive dan Tim Raskin Kecamatan serta diketahui oleh Camat atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.
- i. Berdasarkan MBA-0, Sub Drive membuat rekapitulasi Berita

Acara Pelaksanaan Raskin Kabupaten (Model MBA-1) ditandatangani kepala Sub Drive dan Bupati atau pejabat yang mewakilinya/ditunjuk serta seorang saksi dari Tim Raskin Kabupaten.

- j. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya.

## 2. Pendistribusian raskin melalui warung desa

Pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) melalui warung desa adalah dengan cara beras yang berasal dari gudang bulog langsung di bawa ke warung desa yang disepakati antara pemerintah Kabupaten dengan Drive/Subdrive sebagai tempat penyerahan beras miskin (Raskin) dari satker raskin pada warung desa dilakukan dengan pengawasan Kepala Desa/Lurah. Dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Kadrive/Kasubdrive/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu raskin dan rekap daftar RTS-PM dari seluruh kecamatan yang dirinci perdesa/kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kadrive/Kasubdrive/Kakansilog menerbitkan SPPB/DO beras miskin (Raskin) untuk dimasing-masing kecamatan/desa/Kelurahan kepada kepala gudang tempat penyimpanan beras yang akan disalurkan.
- c. SPPB/DO diserahkan pada satker raskin yang akan mengambil beras dari bulog, mengangkut dan menyerahkan kepada warung

desa. Kemudian dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh satker raskin dan pemilik/pengelola warung desa serta diketahui Kepala Desa.

- d. Pemilik/pengelola warung desa menjual beras miskin (Raskin) kepada RTS-PM yang memiliki kartu raskin dan terdaftar dalam DPM-1. Penjualan beras kepada RTS-PM bisa dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan atau daya beli RTS-PM.
- e. Satker raskin membuat rekapitulasi BAST warung desa di setiap Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh satker raskin dan Kepala Desa/Lurah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang didasarkan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang. Kemudian fakta-fakta tersebut dikumpulkan dalam sebuah data, selanjutnya dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang metode penelitian tersebut serta untuk memperoleh data yang otentik diperlukan adanya pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi keputakaan  
Yaitu suatu teknik penelitian dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diselidiki.

## 2. Studi lapangan

Yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian dilapangan, yang meliputi :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan dengan mencatat kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan pada saat itu berdasarkan penglihatan
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan Camat Maja mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya untuk dipilih responden, jawaban mana yang paling tepat.

Dimana hasilnya dikumpulkan dan dipilihsesuaidengan kebutuhan penelitian, selanjutnya data hasil penelitian ini dianalisis lebih lanjut sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

### Analisis Data

Untuk menganalisis data/angket mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (RASKIN) di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dilakukan dengan menentukan prosentase variabel menurut Nurkencana untuk mengetahui jumlah perbandingan skor masing-masing variabel, dengan rumusan sebagai berikut :

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase jumlah responden yang memberikan jawaban

f = Frekuensi responden yang memberikan jawaban

n = Jumlah yang jadi responden

### PEMBAHASAN

#### **Pelaksanaan Koordinasi oleh Camat dalam Upaya Mencapai Efektivitas Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka**

Koordinasi merupakan usaha yang mengarah dan menyatupadukan kegiatan dan satuan kerja sehingga dapat bergerak dalam suatu kesatuan yang kompak dalam usaha mencapai tujuan bersama. Jelasnya, koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan dan dilakukan secara simultan dari tindakan-tindakan setiap satuan kerja yang terlibat.

Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan, pertumbuhan ini sekaligus membawa akibat pula penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) yang perlu di koordinasikan. Dalam situasi yang demikian ini pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja, akan menjadi rumit, akan tetapi bagaimanapun seorang pimpinan perlu melaksanakan koordinasinya dengan baik.

Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan, karena bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi yang dijalankan. Oleh karena itu dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, apabila ia dapat melakukan koordinasi dengan baik.

Peningkatan usaha koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan



terus-menerus, karena tidak hanya masalah teknis semata-mata, tetapi tergantung dari sikap, tindakan dan langkah dari pimpinan sebagaimana yang telah di uraikan diatas.

Dalam melakukan pembahasan mengenai koordinasi Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wikayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, penulis menyebarkan angket menyangkut pelaksanaan Koordinasi oleh Camat yang didasarkan pada teknik-teknik koordinasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi melalui kewenangan.
- 2) Koordinasi melalui konsensus.
- 3) Koordinasi melalui pedoman kerja.
- 4) Koordinasi melalui forum.
- 5) Koordinasi melalui komperensi.

Kemudian untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini penulis berpedoman kriteria pengukuran analisis data yang dikemukakan oleh Arikunto sebagai mana tertuang pada tabel 1.2

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksannn koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Maja Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- 1) Koordinasi melalui kewenangan

Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan dapat melakukan pendelegasian wewenang sehingga setiap bawahan bisa bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pimpinan, selain itu juga pimpinan bisa melakukan penyesuaian tugas dan fungsi dari setiap bawahan sesuai dengan kemampuan bawahannya.

Begitu pula koordinasi oleh Camat Maja Kabupaten Majalengka harus melaksanakan pendelegasian wewenang

terhadap bawahan dan unit organisasi yang berada dibawahnya, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan semua tugas-tugas dapat dilaksanakan oleh bagiannya masing-masing.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik koordinasi melalui kewenangan oleh Camat Maja, maka penulis sajikan tanggapan responden terhadap kedua indikatornya sebagai berikut :

1. Pendelegasian wewenang

Efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja dapat tercapai, bilamana dalam pelaksanaan koordinasi Camat bisa melaksanakan pendelegasian wewenang dengan baik, sehingga semua pekerjaan serta tugas-tugas dapat dilaksanakan oleh bagiannya masing-masing.

2. Penyesuaian tugas dan fungsi pegawai

Tercapainya efektivitas dalam penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja

sangat tergantung pada usaha Camat di dalam menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas mendistribusikan raskin pada rumah tangga sasaran penerima manfaat, sehingga pada pelaksanaannya setiap pegawai bisa bekerja sesuai dengan kemampuan serta keahliannya dan dapat meminimalisir kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut diatas, dapat diketahui mengenai penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui kewenangan oleh Camat, yaitu sebagai berikut :

1. Pendelegasian wewenang

Sebanyak 77 orang responden (74,1%) menyatakan bahwa Camat selalu



melaksanakan pendelegasian wewenang, sedangkan 25 orang responden (24,1%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang melaksanakan pendelegasian wewenang dan sisanya 2 orang responden (1,8%) menyatakan bahwa Camat tidak melaksanakan pendelegasian wewenang.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah melaksanakan pendelegasian wewenang dengan cukup baik, sehingga setiap bawahannya dapat bekerja sesuai dengan wewenang yang telah dia terima dari atasannya, dan pada akhirnya semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang terhadap bawahan pada dasarnya telah dilaksanakan, yaitu dengan menugaskan seksi pemerintahan pelayanan umum untuk menangani kegiatan administrasi penyaluran beras miskin (Raskin). Selain itu juga memberikan wewenang kepada desa/kelurahan untuk melaksanakan pendistribusian beras miskin (Raskin) pada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Melalui penelitian ternyata dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah kecamatan Maja. Camat telah memberikan wewenang pada bawahannya untuk mengurus pendistribusian beras miskin (Raskin) serta dalam penyelesaian administrasinya.

## 2. Penyesuaian tugas dan fungsi pegawai

Sebanyak 75 orang responden (72,2%) menyatakan bahwa Camat selalu melaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi pegawai, sedangkan 25 orang responden (24,1%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang melaksanakan

penyesuaian tugas dan fungsi pegawai dan sisanya 4 orang responden (3,7 %) menyatakan bahwa Camat tidak melaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi pegawai.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah melaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi pegawai dengan cukup baik, sehingga terdapat kejelasan mengenai rumusan tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Hal ini tentu bisa memudahkan dalam pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi pegawai pada dasarnya telah dilaksanakan, yaitu dengan menugaskan beberapa pegawainya untuk menangani penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, selain itu juga menugaskan setiap Kepala Desa untuk membentuk tim pelaksana distribusi beras miskin (Raskin) Desa, serta membentuk unit pengaduan tingkat Desa sesuai dengan petunjuk teknis raskin.

Melalui penelitian ternyata dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah kecamatan Maja. Camat telah melaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi pegawai pada bawahannya dengan menugaskan pegawai yang memiliki keahlian sesuai bidangnya untuk melaksanakan pendistribusian beras miskin (Raskin) serta dalam penyelesaian administrasinya.

Berdasarkan uraian-uraian tentang penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui wewenang, diketahui bahwa Camat baru mencapai predikat cukup baik di dalam penerapan prinsip



tersebut. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai rata-rata tertinggi dari penerapan tiga sub variabel dari teknik koordinasi melalui konsensus, yaitu baru mencapai sebesar 73,2%. Dengan kondisi demikian jelas akan menghambat dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dari setiap pegawai yang pada akhirnya akan menghambat dalam mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

## 2) Koordinasi melalui konsensus.

Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan mampu mengajak seluruh bawahannya agar dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dapat mengutamakan kepentingan bersama, saling membantu serta harus memiliki rasa saling membutuhkan demi tercapainya tujuan organisasi, selain itu pimpinan harus mampu mengajak bawahannya agar saling bertukar pikiran, saling memberikan ide dan masukan demi kelangsungan organisasi.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik koordinasi melalui konsensus oleh Camat, maka penulis sajikan tanggapan responden terhadap ketiga indikatornya sebagai berikut :

### 1. Mengutamakan kepentingan bersama.

Tercapainya efektivitas dalam penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja sangat tergantung pada kemampuan Camat dalam mengajak serta memberikan arahan pada bawahannya agar pelaksanaan tugas setiap bawahan selalu mengutamakan kepentingan bersama, karena dengan hal tersebut para bawahan akan termotivasi untuk bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini akan mendorong pegawai agar bekerja lebih baik dalam penyaluran raskin.

### 2. Saling membantu dan saling membutuhkan

Keberhasilan dalam pelaksanaan penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja tergantung pada Camat dalam mengarahkan pegawainya untuk biasa saling membantu dalam pelaksanaan tugas serta memiliki rasa saling membutuhkan supaya ada keseimbangan antara tuntutan organisasi (tercapainya efektivitas penyaluran raskin) dengan tuntutan pegawai, baik berupa materi maupun non materi. Sehingga para pegawai akan lebih termotivasi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

### 3. Harus saling memberikan ide dan masukan

Dalam pelaksanaan koordinasi Camat selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk saling memberikan ide serta masukan-masukan yang positif dan membangun, hal ini bisa memberikan motivasi pada pegawai untuk lebih giat dalam bekerja demi kemajuan organisasi serta dapat menghilangkan kecanggungan dan kekakuan terhadap proses kerja yang sedang dilakukan. Dengan sendirinya hal ini akan mendorong meningkatnya hasil kerja yang dilakukan serta dapat memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam organisasi, sehingga efektivitas dalam penyaluran raskin tercapai.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai penerapan tiga sub variabel dari teknik-teknik koordinasi yaitu koordinasi melalui konsensus oleh Camat, sebagai berikut :

### 1. Mengutamakan kepentingan bersama

Sebanyak 61 orang responden (58,6%) menyatakan bahwa Camat selalu mengutamakan kepentingan bersama, sedangkan 38 orang responden (36,5%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang



mengutamakan kepentingan bersama dan sisanya 5 orang responden (4,9%) menyatakan bahwa Camat tidak mengutamakan kepentingan bersama.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah mengutamakan kepentingan bersama dengan cukup baik, sehingga para bawahan termotivasi untuk bekeja dengan baik demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini akan mendorong pegawai agar bekerja lebih baik dalam penyaluran raskin.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari pada dasarnya telah diterapkan, yaitu dengan menanamkan rasa kebersamaan saling menghormati dan menghargai antara atasan dan bawahan serta antar sesama pegawai, baik itu didalam instansi maupun di luar instansi, selain itu dalam setiap pelaksanaan program kegiatan tujuan utama yaitu demi pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya dilakukan demi kepentingan bersama.

## 2. Saling membantu dan saling membutuhkan

Sebanyak 56 orang responden (54,9%) menyatakan bahwa Camat selalu saling membantu dan saling membutuhkan, sedangkan 45 orang responden (43,3%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang saling membantu dan saling membutuhkan dan sisanya 3 orang responden (2,8%) menyatakan bahwa Camat tidak saling membantu dan saling membutuhkan.

Memperhatikan tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses koordinasi, ternyata Camat belum sepenuhnya saling

membantu dan saling membutuhkan dengan bawahannya, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kinerja dan tanggung jawab pegawai, dan pada akhirnya akan menghambat terhadap tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk mengarahkan pegawainya agar dapat saling membantu dalam pelaksanaan tugas serta memiliki rasa saling membutuhkan antara atasan dengan bawahannya dan organisasi ternyata masih mendapat hambatan berupa sikap mementingkan diri sendiri yang terdapat pada diri setiap individu pegawai menjadikan sebagian pegawai merasa enggan untuk saling membantu, bahkan kadang para pejabat pimpinanpun sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain.

Dari hasil penelitian diketahui, ternyata Camat masih kurang dalam memberikan arahan atau bimbingan pada bawahannya untuk dapat saling membantu satu sama lain serta memiliki rasa saling membutuhkan disetiap menjalankan tugas baik itu dengan atasannya maupun dengan organisasi. Hal ini berakibat pada kurangnya keseimbangan antara tuntutan dari atasan dan organisasi dengan tuntutan dari bawahan atau pegawai yang berdampak pada rendahnya semangat kerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) tidak tercapai.

## 3. Saling memberikan Ide dan Masukan

Sebanyak 54 orang responden (51,9%) menyatakan bahwa Camat selalu saling memberikan Ide dan Masukan, sedangkan sebanyak 34 orang responden



(32,7%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang saling memberikan Ide dan Masukan, dan sebanyak 16 orang responden (15,4%) menyatakan bahwa Camat tidak saling memberikan Ide dan Masukan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan koordinasi, ternyata Camat belum sepenuhnya memberikan kesempatan pada bawahan untuk saling memberikan ide dan masukan, sehingga timbul kekakuan dan kecanggungan dari bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, serta sulitnya pemecahan setiap permasalahan yang timbul dalam organisasi. Hal ini jelas bisa mempengaruhi pencapaian efektivitas dalam penyaluran raskin.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa Camat selalu memberikan kesempatan serta menampung setiap aspirasi berupa ide serta masukannya yang positif dan membangun, demi suksesnya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya terkendala waktu dalam setiap program yang kadang bersamaan dengan program lain sehingga tidak memungkinkan bagi seorang Camat untuk selalu menampung dan menerima ide serta masukan dari bawahannya, adakalanya Camat dituntut untuk mengambil keputusan sendiri sebagai seorang pemimpin dan koordinator dalam setiap program kegiatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketahui bahwa dalam penerapan teknik-teknik koordinasi yaitu teknik koordinasi melalui konsensus, ternyata baru mencapai nilai rata-rata sebesar 54,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Camat belum sepenuhnya menerapkan teknik-teknik koordinasi

tersebut, sehingga baru mencapai predikat kurang baik. Dengan kondisi demikian, maka akan berpengaruh terhadap terwujudnya kesatuan tindakan yang merupakan inti dari koordinasi, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap tercapainya efektivitas dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

### 3) Koordinasi melalui pedoman kerja.

Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan harus membuat pedoman kerja agar terdapat adanya kesatuan tindak dan kesatuan gerak dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan selain itu pedoman kerja merupakan sarana pengikat dan pengarah bagi kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan hal ini juga dapat membuat setiap bawahannya berkerja secara teratur sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik koordinasi melalui pedoman kerja oleh Camat, maka penulis sajikan tanggapan responden terhadap kedua indikatornya sebagai berikut :

#### 1. Pembuatan pedoman kerja

Didalam melaksanakan koordinasi, seorang camat selaku koordinator selalu membuat pedoman kerja agar dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### 2. Koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan



Keberhasilan proses koordinasi dalam arti tercapainya efektifitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja, sangat ditentukan oleh kemampuan Camat dalam melaksanakan koordinasi yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan, yaitu koordinasi yang berlandaskan pada pedoman pelaksanaan agar terdapat adanya kesatuan gerak dalam melaksanakan setiap kegiatan dan pekerjaan. Hal ini akan mempermudah dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran raskin, sehingga efektifitas dalam penyaluran raskin dapat tercapai.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai penerapan dua sub variabel dari teknik-teknik koordinasi yaitu koordinasi melalui pedoman kerja oleh Camat, sebagai berikut :

#### 1. Pembuatan pedoman kerja

Sebanyak 78 orang responden (75%) menyatakan bahwa Camat selalu membuat pedoman kerja, sedangkan 23 orang responden (22,2%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang membuat pedoman kerja dan sisanya 3 orang responden (2,8%) menyatakan bahwa Camat tidak membuat pedoman kerja.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah membuat pedoman kerja dengan cukup baik, sehingga para pegawai mempunyai landasan berpijak dan bertindak dalam melaksanakan tugas, pekerjaan serta kegiatannya, sehingga dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang baik. Hal ini dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk pembuatan pedoman kerja dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari pada dasarnya telah dilaksanakan, yaitu dengan menuangkan setiap kebijakan yang telah digariskan kedalam sebuah ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku seperti misalnya Standar Operating Procedures (SOP) untuk perusahaan, sedangkan untuk di Kecamatan ada pedoman pelaksanaan dan pedoman kerja.

Melalui hasil penelitian diperoleh bukti bahwa dengan membuat pedoman kerja, setiap pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan bisa terlaksana dengan baik dan tertib, setra dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal tersebut tentu akan membawa dampak baik bagi tercapainya efektifitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

#### 2. Koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan

Sebanyak 77 orang responden (74,1%) menyatakan bahwa Camat selalu melaksanakan koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan, sedangkan 25 orang responden (24,1%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang melaksanakan koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan sisanya 2 orang responden (1,8%) menyatakan bahwa Camat tidak melaksanakan koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah melaksanakan koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan dengan cukup baik, sehingga setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang diselenggarakan selalu berjalan dengan lancar, Hal ini tentu berdampak pada tercapainya efektifitas



penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa Camat dalam pelaksanaan koordinasi senantiasa melaksanakan koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan, yaitu dengan senantiasa mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan program raskin sesuai dengan aturan yang tertera pada juknis raskin demi kelancaran dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja

Melalui penelitian diperoleh hasil, ternyata Camat telah melaksanakan koordinasi melalui pedoman pelaksanaan. Seperti pelaksanaan Rapat koordinasi dengan desa maupun dengan kabupaten. Hal ini berakibat pada terciptanya keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran dan lainnya dalam pencapaian tujuan bersama yang berdampak pada tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Berdasarkan uraian-uraian tentang penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui pedoman kerja, maka dapat diketahui bahwa Camat baru mencapai predikat cukup baik di dalam penerapan teknik tersebut. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai rata-rata tertinggi dari penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui pedoman kerja, yaitu baru mencapai sebesar 74,5%. Dengan kondisi demikian, maka akan berpengaruh terhadap terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga mampu meningkatkan hasil yang optimal, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

4) Koordinasi melalui forum.

Dalam melaksanakan koordinasi seorang pimpinan dapat membentuk tim kerja untuk dijadikan wadah dalam mengadakan kegiatan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama. Selain itu juga pimpinan hendaknya mampu membagi tugas diluar institusi, dalam rangka menyelesaikan masalah atau tugas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit/organisasi yang bersangkutan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik koordinasi melalui melalui forum oleh Camat, maka penulis sajikan tanggapan responden terhadap kedua indikatornya sebagai berikut :

1. Membentuk tim kerja

Tercapainya efektivitas dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan, tergantung dari kemampuan Camat sebagai koordinator dalam membentuk suatu forum sebagai wadah (wahana) yang dapat di pergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama yaitu dengan membentuk tim kerja.

2. Membagi tugas diluar instansi

Berhasilnya pelaksanaan koordinasi dalam mencapai efektivitas penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja, sangat ditentukan oleh Camat dalam membagi tugas diluar instansi, yang dapat berguna untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun permasalahan yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh unit/organisasi yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Dari tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui tentang penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui forum oleh Camat, yaitu :

1. Membentuk tim kerja

Sebanyak 56 orang (53,9%) menyatakan bahwa Camat selalu membentuk tim kerja, sedangkan sebanyak 45 orang responden (43,3%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang membentuk tim kerja, dan sebanyak 3 orang responden (2,8%) menyatakan bahwa Camat tidak membentuk tim kerja.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan koordinasi, ternyata Camat belum sepenuhnya membentuk tim kerja, sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum bisa di pecahkan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi Camat selalu membentuk tim kerja, khususnya dalam penyaluran beras miskin (Raskin) ini, Camat membentuk tim monitoring dan evaluasi kecamatan yang melibatkan unsur Kecamatan, PLKB, unsur Polsek, tokoh masyarakat, TP PKK dan unsur Dinas/Instansi tingkat Kecamatan yang terkait dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tim tersebut tidak berjalan dengan optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari anggota tim tersebut. Hal ini berdampak pada pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja

Melalui penelitian diperoleh hasil, bahwa Camat belum sepenuhnya memaksimalkan kinerja dari tim monitoring dan evaluasi kecamatan. Hal ini terlihat dari pengamatan di lapangan yang membuktikan masih rendahnya kinerja dari tim tersebut. Sehingga berdampak pada pencapaian efektivitas dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja yang masih belum tercapai

2. Membagi tugas diluar instansi

Sebanyak 57 orang responden (54,8%) menyatakan bahwa Camat selalu membagi tugas diluar instansi, sedangkan sebanyak 35 orang (33,6%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang membagi tugas diluar instansi dan sisanya sebanyak 12 orang responden (11,6%) menyatakan bahwa Camat tidak membagi tugas diluar instansi.

Dari tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan koordinasi, ternyata Camat belum sepenuhnya membagi tugas diluar instansi dalam pelaksanaan, program serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan instansi lain di luar kecamatan. Kondisi demikian akan berdampak pada penurunan tingkat efisiensi dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga menghambat pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dalam membagi tugas diluar instansi masih mendapat kendala, yaitu masih rendahnya kecakapan, keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam menjalankan tugas yang di berikan oleh Camat selaku penanggung jawab pelaksana dan pemantau raskin di tingkat kecamatan. Sehingga berdampak pada hasil kerja yang kurang maksimal dalam pendistribusian raskin maupun



penyelesaian pembayaran dan administrasi.

Melalui penelitian, nampak masih terdapat sebagian pegawai yang menangani pendistribusian beras miskin (Raskin) yang belum memahami benar mengenai prosedur atau mekanisme pendistribusian beras miskin (Raskin) hingga sampai ketangan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Berdasarkan uraian-uraian tentang dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui forum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses koordinasi, ternyata Camat perlu meningkatkan lagi penerapan teknik koordinasi melalui forum. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai tertinggi dari dua sub variabel prinsip tersebut baru mencapai sebesar 54,4%, sehingga baru mencapai predikat kurang baik. Kondisi demikian jelas bisa menghambat dalam peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program serta kegiatan, sehingga akan menghambat dalam pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

#### 5) Kordinasi melalui konperensi.

Dalam melaksanakan koordinasi hendaknya seorang pimpinan dapat melaksanakan rapat-rapat dalam rangka pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Selain itu juga pimpinan dapat mengadakan rapat dalam menyamakan persepsi agar dapat mencegah timbulnya berbagai macam persepsi, sikap dan perilaku yang berbeda-beda dari para bawahan dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknik koordinasi melalui forum oleh Camat, maka penulis

sajikan tanggapan responden terhadap kedua indikatornya sebagai berikut :

#### 1. Melaksanakan rapat pengambilan keputusan

Tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah

Kecamatan Maja, sangat tergantung dari kemampuan Camat dalam melaksanakan rapat-rapat dalam pengambilan keputusan. Yaitu rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana dalam pengambilan keputusan guna memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan.

#### 2. Melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi

Keberhasilan proses koordinasi dalam arti tercapainya efektivitas penyaluran

beras miskin (Raskin), sangat ditentukan oleh kemampuan Camat dalam melaksanakan rapat dalam menyamakan persepsi, yaitu rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan atas maupun pimpinan pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas-tugas dalam sebuah program atau kegiatan, dimana didalam rapat tersebut dijadikan sarana dalam penyesuaian atau pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi maupun instansi atau organisasi yang terkait dalam pelaksanaan program atau kegiatan

Melalui rapat-rapat dalam menyamakan persepsi, diharapkan dapat mencegah timbulnya bermacam-macam persepsi, tindakan, sikap dan perilaku baik pegawai didalam kecamatan maupun diluar kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran beras



miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Dari tanggapan responden pada tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui tentang penerapan dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui konperensi oleh Camat, yaitu :

1. Melaksanakan rapat pengambilan keputusan

Sebanyak 59 orang (56,7%) menyatakan bahwa Camat selalu melaksanakan rapat pengambilan keputusan, sedangkan sebanyak 43 orang responden (41,3%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang melaksanakan rapat pengambilan keputusan, dan sebanyak 2 orang responden (1,8%) menyatakan bahwa Camat tidak melaksanakan rapat pengambilan keputusan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa Camat didalam proses koordinasi telah melaksanakan rapat-rapat atau sidang-sidang pengambilan keputusan dengan cukup baik, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan program atau kegiatan bisa di selesaikan. Hal ini jelas akan berdampak pada tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah kecamatan Maja

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa Camat dalam pelaksanaan koordinasi senantiasa melaksanakan rapat pengambilan keputusan, yaitu dengan mengadakan rapat ketika menghadapi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan program atau kegiatan dilaksanakan, hal tersebut perlu dilakukan guna mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan demi kelancaran setiap program yang dilaksanakan, termasuk pada pelaksanaan

penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Melalui penelitian diperoleh hasil, ternyata Camat telah melaksanakan rapat . rapat pengambilan keputusan. Yaitu melaksanakan rapat ketika ada sebuah desa yang sudah berturut-turut terlambat dalam pelaksanaan distribusi beras serta terlambat dalam penyelesaian administrasinya. Dikarenakan hal tersebut permasalahan desa yang sering terlambat dalam penyaluran maupun penyelesaian administrasinya dapat diatasi. Sehingga tidak akan menjadi contoh buruk bagi desa lain, yang pada akhirnya berdampak pada tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

2. Melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi

Sebanyak 55 orang (52,8%) menyatakan bahwa Camat selalu melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi, sedangkan sebanyak 44 orang responden (42,4%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi, dan sebanyak 5 orang responden (4,8%) menyatakan bahwa Camat tidak melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi.

Memperhatikan tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses koordinasi, ternyata Camat belum sepenuhnya melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi, hal ini menimbulkan perbedaan persepsi, tindakan, sikap dan perilaku pegawai di dalam pencapaian tujuan organisasi. sehingga berpengaruh terhadap rendahnya hasil kerja pegawai di dalam maupun di luar instansinya yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran raskin, dan pada akhirnya akan menghambat terhadap



tercapainya efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa melaksanakan rapat untuk menyamakan persepsi memang belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan berupa dana, sehingga koordinasi sedikit terhambat dan berakibat pada kurangnya pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah kecamatan Maja

Melalui penelitian, ternyata masih ada perbedaan kecakapan serta tindakan di antara para pegawai baik itu pegawai Kecamatan maupun perangkat Desa yang menangani pendistribusian beras miskin (Raskin) kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat. Hal ini Nampak dari perbedaan dalam pendistribusian beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat, dalam penyampaian laporan serta penyelesaian administrasi

Berdasarkan uraian-uraian tentang dua sub variabel dari teknik koordinasi melalui konperensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses koordinasi, ternyata Camat perlu meningkatkan lagi usahanya untuk menerapkan teknik koordinasi melalui konperensi. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai tertinggal dari dua sub variabel teknik tersebut baru mencapai sebesar 54,7 %, sehingga baru mencapai predikat kurang baik. Kondisi demikian jelas akan menghambat dalam peningkatan efektivitas penyelesaian tugas dan pekerjaan para pegawai dalam pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga akan menghambat dalam pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Nilai rata-rata dari teknik-teknik koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Camat sebagai berikut :

1. Koordinasi melalui kewenangan = 73,2
2. Koordinasi melalui konsensus = 54,8
3. Koordinasi melalui pedoman kerja = 74,5
4. Koordinasi melalui forum = 54,4
5. Koordinasi melalui konperensi = 54,7

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Camat dalam penerapan teknik-teknik koordinasi baru mencapai nilai rata-rata sebesar 61,7% dengan predikat “cukup baik“ berdasarkan kriteria pengukuran analisis data (Tabel 1.2). Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa Camat belum sepenuhnya menerapkan teknik-teknik koordinasi, sehingga berpengaruh terhadap terhambatnya peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja pegawai dalam pelaksanaan program atau kegiatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

1. Penyaluran beras miskin (Raskin) tepat waktu

Pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) harus dilaksanakan sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan pada petunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Juknis Raskin) yaitu pendistribusian beras raskin dilaksanakan setiap bulan dengan durasi 12 bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di setiap bulannya.

Sebanyak 74 orang (71,1%) menyatakan bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) selalu tepat waktu, sedangkan sebanyak 27 orang responden (25,9%) menyatakan bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) kadang tepat waktu, dan sebanyak 3 orang responden (2,8%)



menyatakan bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) tidak pernah tepat waktu.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) sudah tepat waktu, sehingga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dapat terus menikmati program beras miskin ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini akan berdampak pada kelancaran dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Melalui penelitian diperoleh hasil bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja sudah tepat waktu, yaitu penyaluran beras miskin (Raskin) dilaksanakan setiap bulan dengan durasi 12 bulan, dengan jadwal waktu pada minggu pertama dan minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut tentu akan membawa dampak baik bagi kelancaran penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

## 2. Penyaluran beras miskin (Raskin) tepat sasaran

Salah satu prinsip dari pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), oleh karena itu penyaluran beras miskin (Raskin) harus tepat sasaran, yaitu beras miskin hanya diberikan pada warga yang terdaftar pada daftar penerima manfaat raskin di Desa/kelurahan.

Sebanyak 55 orang (52,9%) menyatakan bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) selalu tepat sasaran, sedangkan sebanyak 42 orang responden (40,4%) menyatakan bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) kadang-kadang tepat sasaran, dan sebanyak 7 orang responden (6,7%) menyatakan bahwa

penyaluran beras miskin (Raskin) tidak pernah tepat sasaran.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penyaluran beras miskin (Raskin) masih belum tepat sasaran, hal ini tentu berdampak berkurangnya jatah beras bagi warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan raskin (RTS-PM).

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti ternyata, masih banyak dari warga masyarakat mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) padahal ia bukan termasuk kedalam rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), hal ini disebabkan karena banyak faktor. Selain masih adanya desakan warga yang tidak termasuk RTS untuk tetap mendapatkan jatah raskin, banyak juga RTS yang tidak sanggup untuk menebus semua jatah raskin itu yang mencapai 15 kilogram.

## 3. Titik bagi yang mudah dijangkau

Titik bagi merupakan tempat atau lokasi penyerahan beras miskin (Raskin) dari pelaksana distribusi raskin Desa kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Titik bagi yang berada dekat dengan pemukiman warga, bisa mempermudah RTS untuk mendapatkan jatah beras raskin.

Sebanyak 77 orang (74,1%) menyatakan bahwa titik bagi penyaluran beras miskin (Raskin) selalu mudah dijangkau, sedangkan sebanyak 23 orang responden (22,2%) menyatakan bahwa titik bagi penyaluran beras miskin (Raskin) kadang-kadang mudah dijangkau, dan sebanyak 4 orang responden (3,7%) menyatakan bahwa titik bagi penyaluran beras miskin (Raskin) tidak pernah mudah dijangkau.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa titik bagi penyaluran beras miskin (Raskin) mudah



dijangkau oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), sehingga dengan kemudahan tersebut membuat RTS lebih termotivasi untuk menebus jatah berasnya, hal ini bisa mengurangi jumlah warga yang bukan termasuk RTS untuk ikut mendapatkan jatah beras miskin (Raskin).

Melalui penelitian diperoleh hasil bahwa titik bagi raskin di wilayah Kecamatan Maja memang mudah dijangkau oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), sehingga tidak memerlukan biaya tambahan transportasi untuk mendapatkan jatah beras miskin (Raskin).

4. Jumlah beras dan harga sesuai dengan harapan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Jumlah beras bersubsidi atau beras miskin (Raskin) yang harus ditebus setiap bulannya oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) adalah sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,-/Kg Netto di titik distribusi. Hal tersebut berdasarkan pada petunjuk teknis program raskin (Juknis Raskin 2013). Harga tersebut berlaku di titik distribusi yaitu di Kantor Desa/Kelurahan sedangkan di titik bagi harga tebus bervariasi.

Sebanyak 76 orang (73,1%) menyatakan bahwa jumlah beras dan harga selalu sesuai dengan harapan RTS, sedangkan sebanyak 25 orang responden (24,1%) menyatakan bahwa jumlah beras dan harga kadang-kadang sesuai dengan harapan RTS, dan sebanyak 3 orang responden (2,8 %) menyatakan bahwa jumlah beras dan harga tidak pernah sesuai dengan harapan RTS.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beras dan harga ternyata sudah sesuai

dengan harapan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), oleh karena itu pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja dapat berjalan dengan lancar dan kontinyu.

Melalui penelitian ternyata jatah beras sebanyak 15 kg dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,-/Kg yang harus di tebus oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) masih di rasa terlalu membebani bagi sebagian RTS, tetapi hal tersebut bisa teratasi melalui berbagi sebagian jatah beras dengan warga bukan termasuk RTS yang membutuhkan raskin.

5. Efisien penggunaan anggaran dalam penyaluran beras miskin (Raskin)

Berdasarkan petunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Juknis Raskin 2013) disebutkan bahwa segala biaya termasuk biaya sosialisai, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan unit pengaduan (UP) yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program raskin menjadi beban APBD dan perum bulog. Efisien penggunaan anggaran dalam penyaluran beras raskin perlu dilaksanakan mengingat semua anggaran tersebut bersumber dari APBD.

Sebanyak 57 orang (54,8%) menyatakan bahwa selalu efisien penggunaan anggaran dalam penyaluran beras raskin, sedangkan sebanyak 45 orang responden (43,3%) menyatakan bahwa kadang-kadang efisien penggunaan anggaran dalam penyaluran beras raskin, dan sebanyak 2 orang responden (1,9 %) menyatakan bahwa tidak pernah efisien penggunaan anggaran dalam penyaluran beras raskin.

Memperhatikan tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, efisien penggunaan anggaran



dalam penyaluran beras miskin (Raskin) Tidak sesuai dengan aturan, hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan anggaran dalam pelaksanaan penyaluran raskin

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa efisien anggaran dalam penyaluran beras miskin (Raskin) ini sulit dilaksanakan, karena banyak hal-hal tidak terduga yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga tebus beras di titik bagi yang seharusnya Rp. 1.600 menjadi Rp. 2.000 atau bahkan lebih.

#### 6. Pemanfaatan warung Desa

Warung Desa merupakan lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik dimiliki oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya. Warung desa bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjual raskin pada RTS, dengan harga tebus yang sedikit lebih mahal dari ketentuan. Tetapi RTS dapat membeli beras sesuai dengan kemampuannya, tidak harus sekaligus 15 Kg.

Sebanyak 53 orang (50,9%) menyatakan bahwa selalu memanfaatkan warung desa, sedangkan sebanyak 42 orang responden (40,4%) menyatakan bahwa kadang-kadang memanfaatkan warung desa, dan sebanyak 9 orang responden (8,7%) menyatakan bahwa tidak pernah memanfaatkan warung desa.

Berdasarkan tanggapan responden diatas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan warung desa memang belum dilaksanakan, hal ini akan berdampak pada banyaknya warga kurang mampu yang tidak dapat menebus jatah beras miskin (Raskin) pada waktunya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, disetiap Desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Maja ini, hanya beberapa desa saja yang bisa memanfaatkan warung desa sebagai sarana untuk menjual beras kepada RTS dengan cara bertahap. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah warga bukan termasuk RTS serta penadah beras miskin (Raskin) ikut menikmati beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah ini. Dengan alasan agar semua beras miskin (Raskin) dapat terjual, sehingga jumlah beras yang di alokasikan dibulan berikutnya tidak berkurang jumlahnya.

#### 7. Pemanfaatan koperasi Desa

*Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pemanfaatan koperasi Desa dalam penyaluran beras miskin (Raskin) hampir sama dengan pemanfaatan wardes. hanya saja koperasi bisa menjadi pemilik dari warung desa (Wardes).*

Sebanyak 52 orang (50%) menyatakan bahwa selalu memanfaatkan koperasi Desa, sedangkan sebanyak 42 orang responden (40,4%) menyatakan bahwa kadang-kadang memanfaatkan koperasi Desa, dan sebanyak 10 orang responden (9,6 %) menyatakan bahwa tidak pernah memanfaatkan koperasi Desa.

Berdasarkan tanggapan responden diatas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan koperasi desa dalam penyaluran beras miskin (Raskin) belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal tersebut akan berdampak pada kurang efektifnya



penyaluran raskin di wilayah Kecamatan Maja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata pemanfaatan koperasi desa sebagai sarana dalam penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja belum optimal. Terbukti dari semua koperasi yang berada di beberapa Desa, hanya sebagian saja yang melayani pembelian beras miskin bagi RTS-PM.

#### 8. Terpenuhi kebutuhan pegawai

Pemenuhan kebutuhan pegawai sangat penting bagi kelancaran dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin). Gaji/upah yang diterima oleh petugas pelaksana distribusi raskin di Desa/kelurahan yaitu kelompok kerja (Pokja) atau kelompok masyarakat (Pokmas) harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebanyak 56 orang (53,8%) menyatakan bahwa selalu terpenuhi kebutuhan pegawai, sedangkan sebanyak 42 orang responden (44,3%) menyatakan bahwa kadang-kadang terpenuhi kebutuhan pegawai, dan sebanyak 2 orang responden (1,9 %) menyatakan bahwa tidak pernah terpenuhi kebutuhan pegawai.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan petugas belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini berdampak pada rendahnya semangat kerja petugas distribusi dalam melaksanakan tugas menyalurkan beras raskin (Raskin) pada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai masih kurang, yaitu gaji/upah yang masih rendah dan tidak memenuhi kebutuhan dari petugas distribusi raskin. Sehingga terkadang petugas distribusi raskin/pokja

(RT/RW serta beberapa orang yang ditunjuk oleh kepala Desa) mengambil jatah beras miskin (Raskin) untuk dijadikan sebagai upah.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, ternyata baru mencapai nilai rata-rata tertinggi sebesar 60,1%. Dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisis data, maka efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, baru mencapai predikat cukup baik, berdasarkan kriteria pengukuran analisis data.

Memperhatikan uraian-uraian tentang penerapan teknik-teknik koordinasi yang terangkum dalam tabel 4.6 dapat diketahui bahwa koordinasi Camat belum sepenuhnya didasarkan pada teknik-teknik koordinasi, sehingga mempunyai pengaruh terhadap tingkat efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja belum maksimal juga. Hal ini terlihat dari rekapitulasi nilai rata-rata tertinggi penerapan teknik-teknik koordinasi sebesar 61,7% (tabel 4.6) dengan predikat “cukup baik”, menyebabkan pencapaian nilai rata-rata tertinggi efektivitas baru mencapai sebesar 60,1% (tabel 4.7) dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisis data, ternyata baru mencapai predikat cukup baik.

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan koordinasi Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, dapat diketahui bahwa hipotesis yang penulis ajukan, yaitu: “Jika koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat berdasarkan pada teknik-teknik koordinasi, maka efektivitas penyaluran



raskin di wilayah Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tercapai, teruji kebenarannya dan dapat diterima.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Maja dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) belum sepenuhnya menerapkan teknik-teknik koordinasi, hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan responden sebagai berikut :

1. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam upaya mencapai efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja pelaksanaannya belum optimal, hal ini terbukti dari penerapan teknik-teknik koordinasi yang hanya mencapai 61,7% hal ini penilaiannya cukup baik.
2. Penerapan teknik-teknik koordinasi yang berhasil dilaksanakan cukup baik oleh Camat diantaranya adalah :
  - a. Koordinasi melalui kewenangan dengan nilai rata-rata 73,2 %
  - b. Koordinasi melalui pedoman kerja dengan nilai rata-rata 74,5 %
3. Penerapan teknik-teknik koordinasi yang belum berhasil sepenuhnya dilaksanakan oleh Camat diantaranya adalah :
  - a. Koordinasi melalui konsensus dengan nilai rata-rata baru mencapai 54,8 %
  - b. Koordinasi melalui forum dengan nilai rata-rata baru mencapai 54,4 %
  - c. Koordinasi melalui konperensi dengan nilai rata-rata baru mencapai 54,7%
4. Belum diterapkannya teknik-teknik koordinasi secara maksimal oleh Camat, dikarenakan masih mendapat

beberapa hambatan, diantaranya adalah :

1. Masih adanya sikap mementingkan diri sendiri pada pegawai atau petugas
2. Waktu pelaksanaan program yang terbatas serta bersamaan dengan program lain.
3. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab.
4. Masih rendahnya kecakapan, keterampilan dan pengetahuan pegawai.
5. Tidak adanya anggaran dana untuk konperensi.
5. Untuk menaggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan teknik-teknik koordinasi, Camat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  - (1) Pembinaan untuk menanamkan sikap kebersamaan dan persaudaraan antara pegawai atau petugas,
  - (2) Pelaksanaan kegiatan atau pertemuan di luar jam kerja sebagai ajang silaturahmi saling bertukar fikiran.
  - (3) Pemberian bimbingan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
  - (4) Mengikutsertakan para pegawai atau petugas dalam diklat, latihan dan mengikuti setiap sosialisasi yang diadakan oleh pusat di bidang tugas masing-masing disesuaikan dengan kondisi dana yang ada.
  - (5) Dilakukan skala prioritas, menekan pengeluaran anggaran dan mengajukan kenaikan anggaran agar rapat untuk menyamakan persepsi dapat dilaksanakan.



(6) Penerapan teknik-teknik koordinasi yang belum maksimal oleh Camat berakibat pada rendahnya pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, hal ini terlihat dari pencapaian nilai rata-rata tertinggi efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja yang baru mencapai 60,1%. Dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisis data, efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja, baru mencapai predikat cukup baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian yaitu sebagai berikut :

Bahwa tingkat prosentase dalam penerapan teknik-teknik koordinasi oleh Camat dapat mempengaruhi tingkat prosentase dari pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja.

Dalam arti penerapan teknik-teknik koordinasi dengan baik akan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin), dan sebaliknya penerapan teknik-teknik koordinasi secara kurang baik akan berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian efektivitas penyaluran beras miskin (Raskin) di wilayah Kecamatan Maja. Dengan demikian hipotesis yang penyusun ajukan telah teruji kebenarannya dan dapat diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Putra.
- Gibson, James L, Ivancevich, Jhon.M, Donnelly, James H. 1996. *Organiasi*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Handayani, Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- , 1994. *Pengantar Studi Ilmu Adinistrasi Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Handoko, Hani.T. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Liang Ghie. dkk. 1986. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. M.1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sabardi, Agus.1997. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara



- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- 2011. *Azas-azas Manajemen*. Bandung : Refika Aditama
- Sters, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugandha. Dann. 1988. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press